

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pada saat ini dihadapkan dengan merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan *Coronaviruses (Cov)* atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China dan telah menyebar ke 190 negara lebih sehingga pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran Covid-19. Virus tersebut mulai menjadi perhatian dan kepanikan masyarakat semenjak pemerintah mengumumkan adanya dua orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona/Covid-19. Penyebaran wabah corona virus (Covid-19) di Indonesia yang semakin ganas memberikan kecemasan apabila ia menjangkit terlalu lama di Indonesia. Covid-19 secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah lini strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang akan membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah dengan membuat sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan beberapa aspek yang terdampak adanya penyebaran covid-19 seperti pada aspek kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari sisi perekonomian negara Indonesia sangatlah kentara. Menurut Modjo (2020:105) Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Muhyiddin (2020:245) kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi ini sehingga berakibat pada kondisi perekonomian Indonesia lebih terpuruk. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah kebijakan serta strategi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini.

Implikasi yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan sebagai bentuk langkah-langkah penanganan yang berisiko pada ketidak stabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (peraturan.bpk.go.id, 2020)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Dan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (kemenkeu.go.id). Adapun 5 poin Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pertama, Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Kedua, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan dan juga untuk *upgrade* rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Ketiga, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH. Keempat, untuk bidang non-fiskal pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (*lartas*) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau *lartas* impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*. Kelima, stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha,

akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan.

Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik negara-negara dan keberadaan UMKM. Menurut laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam Pakpahan (2020:59) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Dari kondisi tersebut *International Labour Organization* memperkirakan pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kenaikan jumlah pengangguran dengan prediksi jumlah terendah sebanyak 5,3 juta dan jumlah tertinggi sebanyak 24,7 juta yang menandakan bahwa mempertahankan operasi bisnis akan sangat sulit bagi Usaha Kecil dan Menengah OECD Secretary General (2020:2). Presiden Jokowi dalam menghadapi kondisi tersebut telah menyiapkan kesiapsiagaan terhadap kelangsungan UMKM sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat Jpnn.com :

“JPNN.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengupayakan memberikan bantuan kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah dampak kelesuan ekonomi akibat virus Corona. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM melalui telekonferensi pada Rabu (15/4).

"Saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama mempercepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan bayar pokok, kemudian ini yang penting

pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan," kata Jokowi.

Jokowi tidak ingin jajarannya menunggu UMKM bangkrut baru bekerja untuk menghidupkannya. Dia tidak mau ada keterlambatan sehingga menimbulkan masalah baru yang membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat.

"Semua saya minta, semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya dan sehingga kita nantinya bisa memutuskan," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta adanya skema baru dalam pembiayaan agar menarik investor. Terutama berkaitan dengan modal kerja. Jokowi Ingin aspek itu dipermudah, terlebih di daerah-daerah yang benar-benar terdampak virus Corona.

Lalu, Jokowi juga meminta jajarannya menyiapkan skema bantuan sosial terkait sembako kepada pelaku UMKM dan ultramikro.

"Kemudian yang keempat, saya minta untuk UMKM diberikan peluang terus untuk memproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga, serta warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Jokowi."

Sumber:(<https://www.jpnn.com/news/jokowi-upayakan-bantu-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>) diakses pada Minggu 6 September 2020, 13:40 WIB)

Berdasarkan berita diatas, dapat diketahui bahwa Presiden Jokowi telah memberikan fokus pada keberlangsungan UMKM selama pandemi supaya tidak menimbulkan masalah ekonomi baru yang membuat gejolak di tengah – tengah masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM di Indonesia sejumlah 64 juta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia (depkop.go.id, 2018)

Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Ditambah lagi dengan kondisi saat pandemi seperti saat ini yang membuat perkembangan UMKM menjadi terhambat. Dengan begitu, komitmen pemerintah untuk membantu mempertahankan UMKM selama pandemi dibuktikan dalam hal pembuatan regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana salah satu poin kebijakan tersebut mengatur tentang stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan perhatiannya pada UMKM terutama di saat pandemi seperti saat ini. Lebih lanjut lagi mengenai hal yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis adalah bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Di Kabupaten Gresik. Hal tersebut didasari oleh jumlah keberadaan UMKM yang banyak di Kabupaten Gresik dan kondisinya yang terancam gulung tikar akibat adanya pandemi Covid-19 sebagaimana yang terdapat pada pemberitaan yang dimuat dan dikutip oleh media online Bangsaonline.com :

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik, mulai bertumbuhan dan gulung tikar. Hal itu terjadi lantaran adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Gresik, Muhammad Faizin menyatakan bahwa forum dialog yang digelar dengan Wabup dan Kepala Diskop UM dan

Perindag untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi oleh UMKM di masa pandemi Covid-19.

"Jadi, pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada sektor UMKM," ujar Faizin kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (1/7/2020).

Sejumlah UMKM, lanjut Faizin, sangat terpengaruh dengan masa pandemi Covid-19 ini. Permintaan produk maupun penjualan barang menurun drastis. "Fakta ini yang membuat para pelaku UMKM yang tak punya banyak modal, bertumbuhan dan gulung tikar," ungkapnya.

Karena itu, Faizin berharap agar Pemkab Gresik bisa membantu kesulitan UMKM. "Kami meminta keringanan berupa insentif pajak. UMKM juga meminta lebih diberdayakan serta dibantu lebih berinovasi, dan memasarkan produk," tukasnya.

Sumber: (<https://bangsaonline.com/berita/76460/gulung-tikar-akibat-pandemi-wabup-qosim-ajak-dialog-asosiasi-umkm-gresik>) diakses pada Senin 14 September 2020, 15:40 WIB)

Berdasarkan pemberitaan di atas dapat diketahui bahwa sejumlah UMKM di Kabupaten Gresik pada masa pandemi ini mulai bertumbuhan dan gulung tikar. Menurut pendapat ketua Asosiasi UMKM di Kabupaten Gresik, Muhammad Faizin bahwa sejumlah UMKM sangat terpengaruh dengan masa pandemi Covid-19. Para pelaku UMKM yang tak punya banyak modal terancam gulung tikar karena permintaan produk maupun penjualan barang menurun drastis. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik untuk menanggapi masalah yang dihadapi pelaku UMKM mengingat baanyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Gresik. Data berikut menggambarkan jumlah penyebaran UMKM tiap kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Yang Tersebar di Masing – Masing Kecamatan Di
Kabupaten Gresik selama tahun 2015 – 2019

No.	Nama Kecamatan	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Wringinanom	Buah	12.316	12.376	12.376	12.376	12412
2.	Driyorejo	Buah	11.083	11.143	11.143	11.143	11.175
3.	Kedamean	Buah	11.988	12.048	12.048	12.048	12.081
4.	Menganti	Buah	12.979	13.039	13.079	13.039	13.075
5.	Cerme	Buah	13.078	13.138	13.283	13.138	13.173
6.	Benjeng	Buah	11.700	11.760	11.830	11.760	11.794
7.	Balongpanggung	Buah	14.078	14.138	14.253	14.138	14.175
8.	Duduksampeyan	Buah	11.293	11.353	11.423	11.353	11.386
9.	Kebomas	Buah	12.841	12.901	12.981	12.901	12.934
10.	Gresik	Buah	12.900	12.960	12.960	12.960	13.013
11.	Manyar	Buah	13.101	13.161	13.161	13.161	13.195
12.	Bungah	Buah	7.796	7.856	7.856	7.856	7.878
13.	Sidayu	Buah	7.501	7.561	7.561	7.561	7.581
14.	Dukun	Buah	8.563	8.623	8.623	8.623	8.645
15.	Panceng	Buah	7.777	7.837	7.837	7.837	7.858
16.	Ujungpangkah	Buah	6.890	6.950	6.950	6.950	6.969
17.	Sangkapura	Buah	9.374	9.434	9.434	9.434	9.461
18.	Tambak	Buah	5.753	5.813	5.813	5.813	5.828
	Total		191.011	192.091	192.611	192.091	192.641

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag, 2020

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Gresik selalu mengalami kenaikan jumlah kecuali pada tahun 2018. Dari tahun 2015 jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Gresik sebanyak 191.011 buah dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 195.091 buah. Kemudian dari tahun 2016 menuju 2017, jumlah UMKM juga mengalami kenaikan menjadi 192.611 buah. Akan tetapi pada tahun 2018 jumlah UMKM sedikit mengalami penurunan menjadi 192.091 buah. Dan pada

tahun 2019 jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan sehingga jumlahnya menjadi 192.641 buah. Di tahun 2019 jumlah UMKM didominasi oleh banyaknya Usaha Mikro. Data berikut menggambarkan jenis usaha UMKM dan jumlahnya di masing – masing Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Tabel 1.2
Jenis Usaha UMKM di Masing – Masing Kecamatan se-Kabupaten Gresik

No.	Nama Kecamatan	Satuan	Tahun 2019			
			Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Menengah	Jumlah
1.	Wringinanom	Buah	11.680	650	82	12.412
2.	Driyorejo	Buah	10.470	620	85	11.175
3.	Kedamean	Buah	10.819	1.205	57	12.081
4.	Menganti	Buah	11.838	1.161	76	13.075
5.	Cerme	Buah	11.433	1.665	75	13.173
6.	Benjeng	Buah	11.009	700	85	11.794
7.	Balongpanggung	Buah	12.27	1.775	130	14.175
8.	Duduksampeyan	Buah	10.731	589	66	11.386
9.	Kebomas	Buah	10.888	1.905	141	12.934
10.	Gresik	Buah	10.502	2.355	156	13.013
11.	Manyar	Buah	11.089	1.960	146	13.195
12.	Bungah	Buah	7.133	695	50	7.878
13.	Sidayu	Buah	6.761	765	55	7.581
14.	Dukun	Buah	7.135	1.424	86	8.645
15.	Panceng	Buah	7.051	754	53	7.858
16.	Ujungpangkah	Buah	6.258	650	61	6.969
17.	Sangkapura	Buah	8.859	550	52	9.461
18.	Tambak	Buah	5.172	600	57	5.828
	Total		171.105	20.023	1.513	192.641

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perindag, 2020

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Gresik terdapat 192.641 UMKM yang terdiri dari 171.105 Usaha Mikro, 20.023

Usaha Kecil dan 1.513 Usaha Menengah. Dari ketiga jenis usaha yang ada, jumlah terbanyak didominasi oleh Usaha Mikro yaitu sebanyak 171.105 buah. Dari banyaknya usaha Mikro tersebut, bidang usaha yang paling banyak adalah usaha bidang kuliner dan usaha bidang fashion (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag, 2020).

Dengan demikian, banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Gresik membuat masyarakat Gresik banyak yang terdampak secara perekonomiannya selama pandemi ini. Hal tersebut terjadi karena selama pandemi, roda perekonomian tidak berjalan dengan lancar akibat adanya PSBB dan sejumlah dampak lainnya yang ditimbulkan oleh adanya pandemi. Pada sektor UMKM sendiri, usaha yang banyak terdampak adalah pada Usaha Mikro.

Usaha Mikro merupakan salah satu jenis dari usaha yang ada pada UMKM. UMKM terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada masa pandemi covid-19 saat ini memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha UMKM utamanya pelaku usaha mikro. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada pemberitaan yang dimuat oleh media online faktualnews.co :

“GRESIK, FaktualNews.co – Berlangsungnya PSBB tahap dua di Gresik, sektor yang paling dirugikan adalah para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

“Perusahaan besar masih bisa recovery dengan tabungannya. Bagaimana dengan nasib Saudara-saudara pedagang kecil kita??? Mereka harus berjuang keras setiap hari, karena penghasilannya hanya untuk hari itu juga,” cetus Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir saat mengunjungi Pusat Kuliner Jajanan Desa di Desa Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Gresik, Kamis (13/5/2020).

Lebih lanjut, politikus muda yang membidangi perekonomian dan keuangan DPRD Gresik ini menandaskan, pihaknya berharap, perpanjangan PSBB di Gresik jangan sampai menutup jalan akses perdagangan antar desa.

“Itu Konyol. Sekarang ini bukan melulu resiko kesehatan, ini sudah resiko ekonomi. Apalagi ini menghadapi Hari Raya banyak kebutuhan, tidak pegang uang, apa tidak pusing,” ungkapnya, Kamis (14/5/2020).

Syahrul, anggota dewan termuda ini juga mengajak para kawula muda untuk turut membantu desanya masing-masing agar wabah corona ini segera berakhir. Menurutnya, peran aktif generasi muda milenial sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Di desa itu ada anggaran jaga keluar masuk desa melalui anggaran DD (Dana Desa) penanganan Covid-19. Tapi masalahnya, ternyata banyak yang gak mau jaga, Ayo rek, ini jaga ibadah luar biasa. Akses jalur perdagangan desa biar dibuka semua, tapi tetap terjaga,” ajak Syahrul.

Syahrul juga menyindir terkait gaji ASN (Aparat Sipil Negara) tidak usah dipotong, karena uang mereka yang akan meningkatkan daya beli, sehingga UMKM tidak kehilangan pelanggannya. Uang bisa berputar pada lapis masyarakat bawah.

Sumber: (<https://faktualnews.co/2020/05/14/covid-19-psbb-tahap-dua-gresik-sektor-umkm-paling-dirugikan/213885>) diakses pada Senin 14 September 2020, 15:40 WIB)

Berdasarkan pemberitaan diatas dapat diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini memberikan dampak buruk bagi pelaku UMKM. Banyak UMKM yang merugi terutama pada usaha mikro. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, jika perusahaan besar masih bisa recovery dengan tabungannya maka Usaha Mikro perlu bantuan dari masyarakat serta peran pemerintah dalam menghadapi masalah yang timbul selama pandemi covid-19 ini. Para pelaku Usaha Mikro sangat berharap pemerintah membantu penguatan serta pemulihan usaha mereka selama pandemi ini berlangsung. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan upaya untuk menangani masalah tersebut, sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat jatimnet.com :

“JATIMNET.COM, Gresik - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten mengusulkan seribuan pelaku

UMKM di Kabupaten Gresik ke pemerintah pusat, untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau modal senilai Rp 2,4 Juta/UMKM.

Diketahui pemerintah pusat memberikan stimulus bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi, bantuan ini langsung masuk ke rekening penerima bantuan (UMKM)

Meski tidak dijelaskan jumlah total UMKM di Gresik, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Gresik Agus Budiono mengatakan pihaknya telah mengusulkan ribuan UMKM untuk mendapatkan stimulus bantuan dampak Covid-19 tersebut.

"Benar, sesuai surat proposal yang dikirim langsung Kemenkop ada 1.014 calon penerima yang diusulkan mendapatkan bantuan," terangnya di konfirmasi, Senin 24 Agustus 2020.

Ia menjelaskan, Diskoperindag Gresik sudah melakukan pendataan kepada UMKM yang sesuai dan berhak mendapatkan, soal kapan waktu penyaluran bantuan tersebut merupakan keputusan Kementrian.

Untuk mendapatkan hal itu, menurut Agus ada berbagai syarat diantaranya calon penerima tidak memiliki pinjaman di bank, kemudian punya rekening di bank yang saldonya harus kurang dari Rp 2 Juta per bulan Juni 2020.

"Kami hanya memfasilitasi, kemudian stimulus bantuan UMKM Gresik sudah kami usulkan ke pusat," kata Agus memungkasi."

Sumber: (<https://jatimnet.com/diskoperindag-gresik-usulkan-ribuan-umkm-dapat-stimulus-bantuan-24-juta-rupiah>) diakses pada Selasa 22 September 2020, 21:17 WIB)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Gresik telah mengusulkan ribuan UMKM untuk mendapatkan stimulus bantuan dampak Covid-19 kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menyiapkan stimulus bantuan kepada Usaha Mikro dan menengah yang terdampak pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi dan bantuan itu akan langsung masuk ke rekening penerima. Bantuan stimulus itu dikenal dengan sebutan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kemudian, berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa nampaknya Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebagai pelaksana program dari pemerintah pusat. Salah satu peran yang nampak

adalah peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan. sebagai fasilitator. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan kepada Usaha Mikro yang sesuai dan berhak mendapatkan bantuan sedangkan untuk penyaluran bantuan tetap dilaksanakan oleh Kementrian.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik melakukan pendataan dan mengusulkan pelaku usaha mikro untuk menerima bantuan BPUM. Untuk itu mereka melakukan pendataan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu kecamatan yang dilakukan pendataan kepada Usaha Mikro yang diusulkan untuk menerima bantuan BPUM adalah di Kecamatan Manyar. Berdasarkan data yang diuraikan sebelumnya, Kecamatan Manyar merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah Usaha Mikro terbesar di Kabupaten Gresik. Dengan banyaknya jumlah usaha mikro yang tersebar di Kecamatan Manyar, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu pelaksanaan program pemerintah pusat melakukan pendataan kepada usaha mikro di Kecamatan Manyar yang terdampak pandemi dan mengusulkan sejumlah usaha mikro yang layak mendapatkan stimulus bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM khususnya pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas program pemerintah pusat. Seperti yang dijelaskan oleh Gede Diva

(2009:15) peran dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Mendasarkan pada data yang telah diuraikan penulis adanya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tahun 2020 terhadap UMKM di Kabupaten Gresik utamanya pada Usaha Mikro di Kecamatan Manyar. Peneliti berpendapat diperlukan peran pemerintah daerah dalam hal ini . Oleh karena itu peneliti ini mempunyai judul **“Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Di Kabupaten Gresik (Studi Usaha Mikro di Kecamatan Manyar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Di Kabupaten Gresik (Studi Usaha Mikro di Kecamatan Manyar) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Di Kabupaten Gresik (Studi Usaha Mikro di Kecamatan Manyar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Mahasiswa

a) Dapat memperdalam pengetahuan tentang peran Dinas Koperasi Usaha

Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM khususnya Usaha Mikro di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

b) Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan progam studi Ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik untuk menjalankan perannya guna membantu para pelaku UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.